

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUBANG**



**BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2018**



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2018  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah ;
2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal ;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
  2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
  3. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;
2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

### BAB IV

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
- A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :
    1. Kepala Sekolah;
    2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
      - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
      - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
      - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
      - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
    3. Pengelola Ketatausahaan;
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawahi :
    1. Kepala Sekolah;
    2. Pengelola Ketatausahaan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
  2. Pengelola Ketatausahaan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri, membawahi :

1. Kepala Sekolah;
  2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
    - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
    - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
    - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
  3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
    - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
    - b. Urusan Peserta Didik;
    - c. Urusan Kepegawaian;
    - d. Urusan Keuangan;
    - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
    - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
    - g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non-eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 29 Januari 2018



Diundangkan di Subang  
pada tanggal 29 Januari 2018



Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 16 SERI :



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUBANG

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

1. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	SMP NEGERI 1 BINONG	Binong
2	SMP NEGERI 2 BINONG	Binong
3	SMP NEGERI 1 BLANAKAN	Blanakan
4	SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG	Blanakan
5	SMP NEGERI 3 BLANAKAN	Blanakan
6	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN	Blanakan
7	SMP NEGERI 1 CIASSEM	Ciasem
8	SMP NEGERI 2 CIASSEM	Ciasem
9	SMP NEGERI 3 CIASSEM	Ciasem
10	SMP NEGERI 4 CIASSEM	Ciasem
11	SMP NEGERI 1 CIATER	Ciater
12	SMP NEGERI 1 CIBOGO	Cibogo
13	SMP NEGERI 2 CIBOGO	Cibogo
14	SMP NEGERI 1 CIJAMBE	Cijambe
15	SMP NEGERI 2 CIJAMBE	Cijambe
16	SMP NEGERI 1 CIKAUM	Cikaum
17	SMP NEGERI 2 CIKAUM	Cikaum
18	SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
19	SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
20	SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
21	SMP NEGERI SATU ATAP KARYA UTAMA	Cipeundeuy
22	SMP NEGERI 1 CIPUNAGARA	Cipunagara
23	SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA	Cipunagara
24	SMP NEGERI 3 CIPUNAGARA	Cipunagara
25	SMP NEGERI 1 CISALAK	Cisalak
26	SMP NEGERI 2 CISALAK	Cisalak
27	SMP NEGERI 1 COMPRENG	Compreng
28	SMP NEGERI 2 COMPRENG	Compreng
29	SMP NEGERI 1 DAWUAN	Dawuan
30	SMP NEGERI 2 DAWUAN	Dawuan

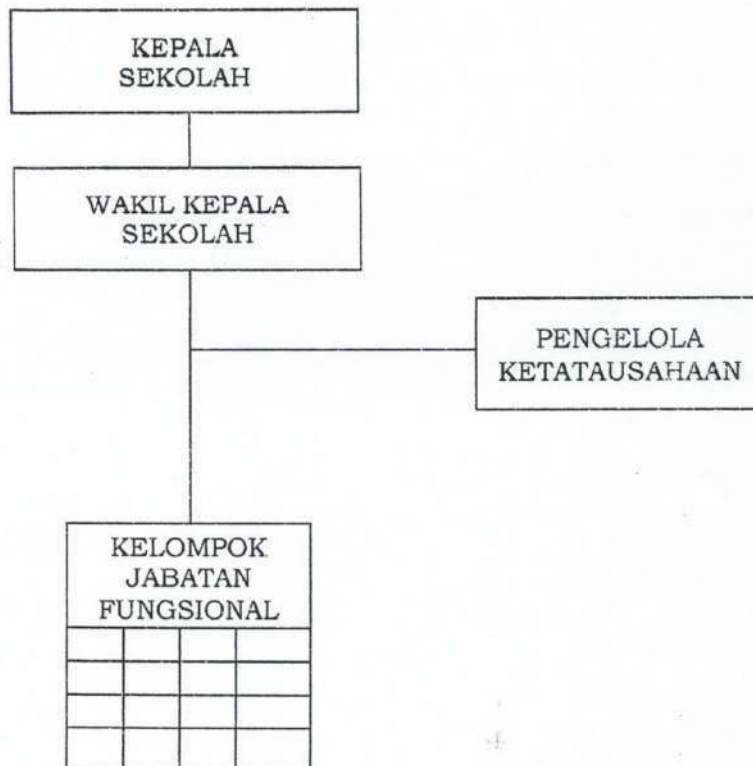


1	2	3
535	SD NEGERI PAMANUKAN II	Pamanukan
536	SD NEGERI PAMANUKAN III	Pamanukan
537	SD NEGERI PAMANUKAN IV	Pamanukan
538	SD NEGERI PAMANUKAN SEBRANG I	Pamanukan
539	SD NEGERI PAMANUKAN V	Pamanukan
540	SD NEGERI PAMANUKAN VII	Pamanukan
541	SD NEGERI PAMANUKAN VIII	Pamanukan
542	SD NEGERI PUSAKA	Pamanukan
543	SD NEGERI RAHAYU KECAMATAN PAMANUKAN	Pamanukan
544	SD NEGERI RANCAHILIR	Pamanukan
545	SD NEGERI SUKAMAHI	Pamanukan
546	SD Negeri Sukamulya	Pamanukan
547	SD NEGERI AMPERA PATOKBEUSI	Patokbeusi
548	SD NEGERI BAKTI WINAYA	Patokbeusi
549	SD NEGERI BINA WINAYA	Patokbeusi
550	SD NEGERI BUDI MEKAR	Patokbeusi
551	SD NEGERI CIBANTENG	Patokbeusi
552	SD NEGERI CIBERES	Patokbeusi
553	SD NEGERI GARDU	Patokbeusi
554	SD NEGERI JATI RAGAS I	Patokbeusi
555	SD NEGERI JATI RAGAS II	Patokbeusi
556	SD NEGERI JATI WINAYA	Patokbeusi
557	SD NEGERI JATIMULYA PATOKBEUSI	Patokbeusi
558	SD NEGERI JAYA WINAYA	Patokbeusi
559	SD NEGERI KARANGKAMULYAN	Patokbeusi
560	SD NEGERI KARANGWINAYA	Patokbeusi
561	SD NEGERI KAROKROK	Patokbeusi
562	SD NEGERI KARYA MEKAR PATOKBEUSI	Patokbeusi
563	SD NEGERI MEKARBAKTI	Patokbeusi
564	SD NEGERI MEKARJAYA PATOKBEUSI	Patokbeusi
565	SD NEGERI MEKARSARI PATOKBEUSI	Patokbeusi
566	SD NEGERI MITABUDAYA PATOKBEUSI	Patokbeusi
567	SD NEGERI MULYASARI PATOKBEUSI	Patokbeusi
568	SD NEGERI PANCA DAYA	Patokbeusi
569	SD NEGERI PANGIPUKAN	Patokbeusi
570	SD NEGERI PASIR KONCI	Patokbeusi
571	SD NEGERI PATOKBEUSI	Patokbeusi
572	SD NEGERI PELITA	Patokbeusi
573	SD NEGERI PUNDONG	Patokbeusi
574	SD NEGERI PURWA MEKAR	Patokbeusi
575	SD NEGERI PURWASARI PATOKBEUSI	Patokbeusi
576	SD NEGERI PUTRA BUDAYA	Patokbeusi
577	SD NEGERI RANCA BUDAYA	Patokbeusi
578	SD NEGERI RANCA WINAYA	Patokbeusi
579	SD NEGERI RANCABANGO	Patokbeusi
580	SD NEGERI SARENGSENG JAYA	Patokbeusi
581	SD NEGERI SUKAMULYA PATOKBEUSI	Patokbeusi
582	SD NEGERI TANJUNG RASA	Patokbeusi



**BAGAN STRUKTUR  
ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA  
NEGERI (SMPN)**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2018  
TANGGAL : 29 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN  
PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN  
SUBANG**



**BUPATI SUBANG,**  
*[Signature]*  
**H. IMAS ARYUMINGSIH**

BAGAN STRUKTUR  
ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL SEKOLAH DASAR  
NEGERI (SDN)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2018  
TANGGAL : 29 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN  
PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN  
SUBANG

